

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan secara spesifik pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Provinsi Banten terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan penyediaan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follows function*).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1 PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun 2007-2011 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2007-2011 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan potensi pendapatan daerah.

3.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Periode Tahun 2007-2011

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2007-2011 sebagaimana tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011 *)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	Pendapatan Daerah	1.909.020	2.351.381	2.436.096	3.139.451	3.755.614	18,82
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.298.365	1.661.169	1.687.751	2.321.749	2.895.570	22,96
1.1.1	Pajak Daerah	1.246.281	1.601.611	1.617.822	2.208.083	2.769.882	22,86
1.1.2	Retribusi Daerah	3.052	3.184	2.921	3.195	3.780	5,94
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.835	21.479	29.415	37.874	31.533	17,35
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31.197	34.895	37.592	72.595	90.374	34,30
1.2	Dana Perimbangan	607.804	686.651	744.967	812.654	849.491	8,77
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	277.207	325.810	351.666	417.015	343.927	6,63
1.2.2	Dana Alokasi Umum	330.597	342.744	361.179	381.979	460.384	8,83
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	18.097	32.121	13.661	45.180	83,58
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.850	3.561	3.379	5.049	10.554	44,57
1.3.1	Hibah	2.580	3.561	3.016	4.482	4.373	17,22
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	363	553	4.895	209,47
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	14	1.286	2.324,01

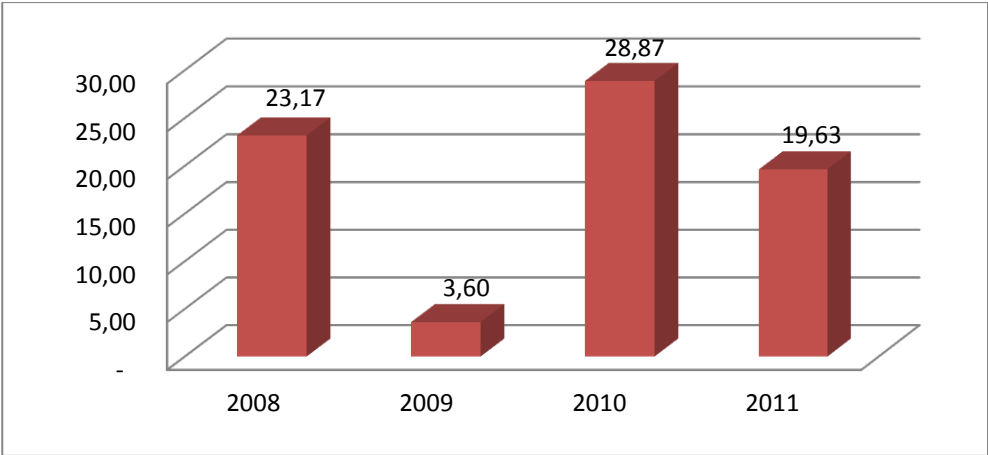
Sumber: Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2007-2010

**) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2011 (un-audited)*

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir (2007-2011) sebesar 18,82% per tahun. Struktur Pendapatan Daerah periode Tahun 2007-2012 secara berurutan didominasi oleh : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan rata-rata pertumbuhan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 22,96% per tahun. Jenis PAD yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pajak Daerah sebesar 22,86% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Retribusi Daerah sebesar 5,94% per tahun.

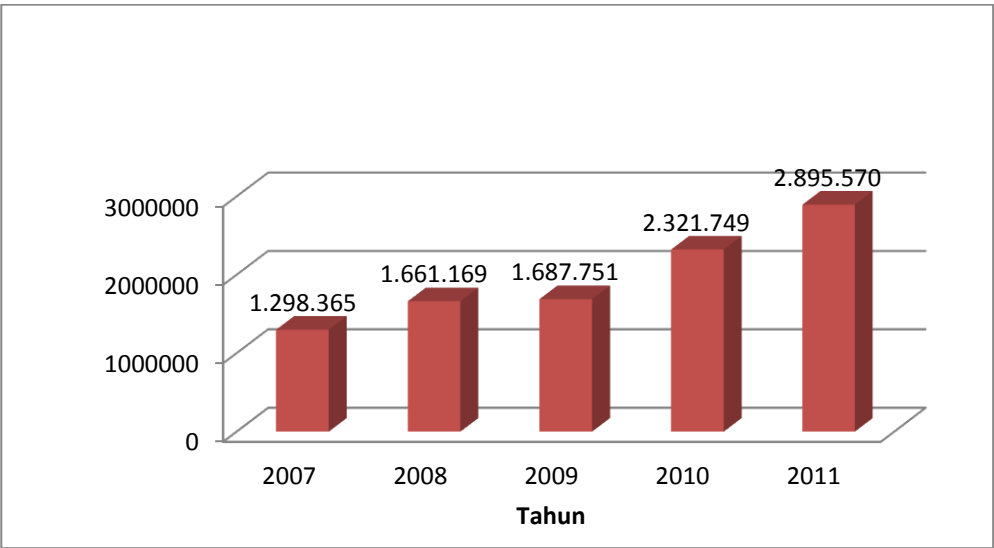
Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Banten
Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Pada grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007 hingga 2011 tidak stabil, terutama dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh situasi nasional pada saat itu, yakni tahun 2009, di saat pemilihan Presiden Republik Indonesia, pendapatan nasional (LPE) mengalami pertumbuhan yang sangat rendah yakni 3,60% dan kembali meningkat tajam pada tahun 2010 sebesar 28,87%. Demikian pula Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2010 turun menjadi 6,08% dan kembali meningkat menjadi 6,43 % pada Tahun 2011.

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)

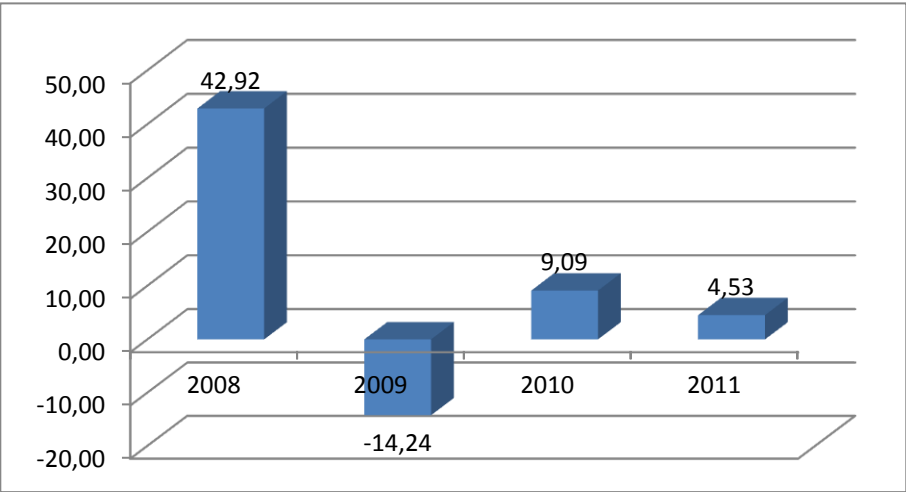


Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2010 terus menunjukkan kenaikan, realisasi penerimaan PAD selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mengelola dan mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada.

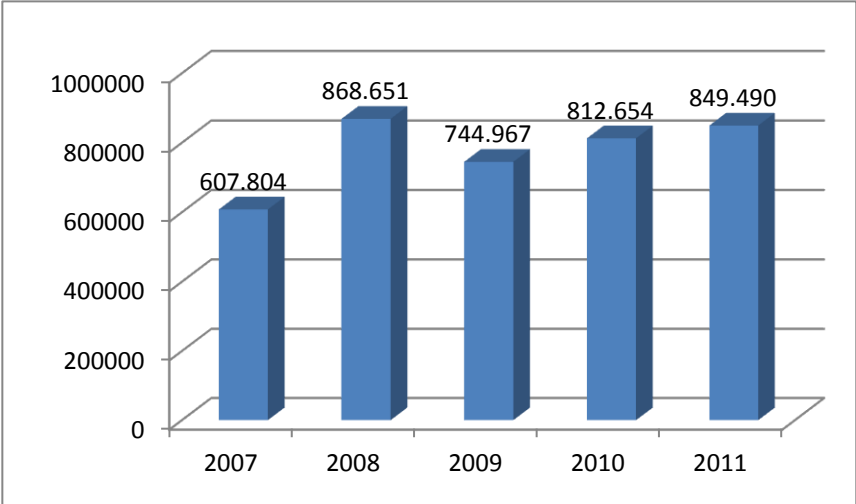
- b. Dana Perimbangan sebesar 8,77% per tahun. Jenis Dana Perimbangan yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Dana Alokasi Khusus sebesar 83,58% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 6,63% per tahun.

Gambar 3.3
Grafik Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

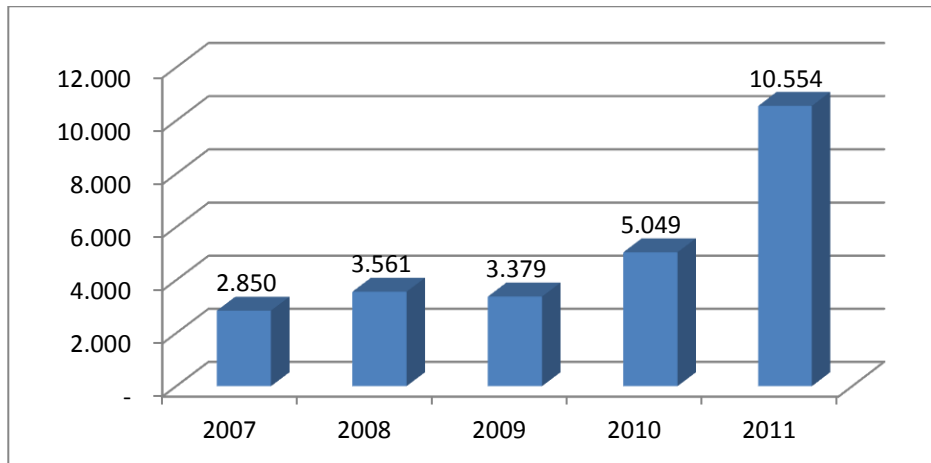
Gambar 3.4
Grafik Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

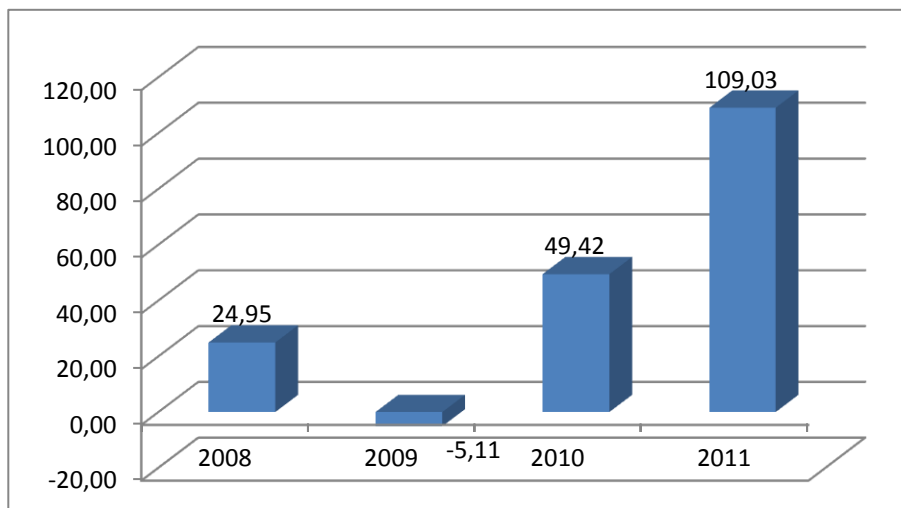
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 44,57% per tahun. Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi pada Pendapatan Lainnya sebesar 2.324,01% per tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Hibah sebesar 17,22% per tahun.

Gambar 3.5
Grafik Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Gambar 3.6
Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode Tahun 2007-2011

Perbandingan target dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten periode Tahun 2007-2011 dijelaskan sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
PENDAPATAN DAERAH	1.899.730.331.917	1.908.749.559.388	100,47	2.262.823.333.290	2.351.380.504.656	103,91	2.307.104.222.411	2.436.096.122.341	105,59	2.750.902.035.850	3.139.451.309.696	114,12	3,527,316,555,823	3.755.614.331.680	106,47
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.306.871.331.917	1.298.365.304.058	99,35	1.601.222.147.490	1.661.168.634.116	103,74	1.539.768.500.936	1.687.750.749.401	109,61	1.924.534.634.850	2.321.748.521.954	120,64	2.672.749.200.000	2.895.569.551.292	108.34
PAJAK DAERAH	1.263.350.000.000	1.246.280.794.884	98,65	1.545.988.000.000	1.601.610.635.447	103,60	1.474.100.000.000	1.617.821.795.281	109,75	1.846.500.000.000	2.208.083.478.083	119,58	2.601.000.000.000	2.769.882.202.622	106.49
Pajak Kendaraan Bermotor	418.500.000.000	410.898.711.332	98,18	473.000.000.000	493.981.945.857	104,44	533.500.000.000	562.722.964.415	105,48	614.500.000.000	689.076.910.840	112,14	803.450.000.000	855.537.327.540	106,48
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	473.500.000.000	500.664.397.353	105,74	691.272.000.000	702.446.796.200	101,62	588.000.000.000	673.401.042.500	114,52	859.000.000.000	1.086.432.898.500	126,48	1.415.550.000.000	1.428.169.574.900	100,89
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	350.000.000.000	313.481.790.539	89,57	360.000.000.000	382.933.300.340	106,37	326.000.000.000	352.625.776.452	108,17	346.000.000.000	400.147.797.867	115,65	368.000.000.000	468.970.596.039	127,44
Pajak Air Bawah Tanah (PABT)	11.283.000.000	10.520.260.991	93,24	10.716.000.000	10.757.853.905	100,39	12.800.000.000	14.250.614.239	111,33	13.000.000.000	15.816.371.231	121,66	-	-	-
Pajak Air Permukaan (PAP)	10.067.000.000	10.715.634.669	106,44	11.000.000.000	11.490.739.145	104,46	13.800.000.000	14.821.397.675	107,40	14.000.000.000	16.609.499.645	118,64	14.000.000.000	17.204.704.143	122,89
RETRIBUSI DAERAH	2.610.000.000	3.052.565.172	116,96	2.733.000.000	3.184.526.651	116,52	2.949.000.000	2.921.743.038	99,08	2.949.000.000	3.195.528.168	108,36	2.818.000.000	3.780.282.690	134.15
RETRIBUSI JASA UMUM	840.000.000	1.021.567.400	121,62	652.000.000	825.762.460	126,65	688.000.000	800.807.690	116,40	688.000.000	889.975.950	129,36	788.000.000	1.244.545.710	157,94
Retribusi Pelayanan Kesehatan	145.000.000	134.999.950	93,10	148.000.000	214.020.440	144,61	159.000.000	217.956.960	137,08	159.000.000	213.657.300	134,38	209.000.000	413.057.160	197,64

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	420.000.000	557.061.500	132,63	504.000.000	611.742.020	121,38	529.000.000	582.850.730	110,18	529.000.000	676.318.650	127,85	579.000.000	831.488.550	143,61
Retribusi Pengujian Hasil	275.000.000	329.505.950	119,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUSI JASA USAHA	310.000.000	474.979.380	153,22	585.000.000	386.787.941	66,12	650.000.000	866.274.508	133,27	650.000.000	653.603.867	100,55	660000000	684243180	103,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	230.000.000	439.143.380	190,93	500.000.000	349.749.441	69,95	550.000.000	821.974.508	149,45	550.000.000	552.788.867	100,51	550.000.000	574.064.180	104,38
Retribusi Balai Benih Ikan	80.000.000	28.834.000	36,04	85.000.000	37.038.500	43,57	100.000.000	44.300.000	44,30	100.000.000	100.815.000	100,82	110.000.000	110.179.000	100,16
Retribusi Perum Damri	-	7.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU	1.460.000.000	1.556.018.392	106,58	1.496.000.000	1.971.976.250	131,82	1.611.000.000	1.254.660.840	77,88	1.611.000.000	1.651.948.350	102,54	1.370.000.000	1.851.493.800	135,15
Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000	7.504.800	150,10	6.000.000	17.971.400	299,52	17.000.000	9.952.000	58,54	17.000.000	10.556.000	62,09	17.000.000	7.992.000	47,01
Retribusi Sertifikasi Pengujian Hasil Mutu Perikanan	15.000.000	15.579.300	103,86	17.000.000	37.527.950	220,75	48.000.000	48.210.490	100,44	48.000.000	64.735.350	134,87	53.000.000	69.911.400	131,91
Retribusi Jasa Perhubungan	1.440.000.000	1.532.934.292	106,45	1.473.000.000	1.916.476.900	130,11	1.546.000.000	1.196.498.350	77,39	1.546.000.000	1.576.657.000	101,98	1.300.000.000	1.773.590.400	136,43

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011*)		
	TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI		TARGET (RP.)	REALISASI	
		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%		RP.	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	17.660.831.917	17.834.634.333	100,98	21.427.147.490	21.478.616.999	100,24	29.341.500.936	29.415.351.892	100,25	37.485.634.850	37.874.447.006	101,04	31.300.000.000	31.532.942.304	100,74
LAIN-LAIN PADANG YAH SAH	23.250.500.000	31.197.309.669	134,18	31.074.000.000	34.894.855.019	112,30	33.378.000.000	37.591.859.190	112,62	37.600.000.000	72.595.068.697	193,07	37.631.200.000	90.374.123.676	240,16

Sumber : Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010

Keterangan : *) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2011 un-audited

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011 terus menunjukkan kecenderungan kenaikan.

Dengan melihat struktur pendapatan daerah dari tahun 2007-2011, dapat diukur rata-rata rasio kemandirian daerah dari Provinsi Banten, yakni :

Rasio Kemandirian Daerah	=	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{PAD} + \text{Dana Perimbangan} + \text{Sisa Pinjaman Daerah}} \times 100\%$
--------------------------	---	---

Tabel 3.3
Perkembangan Rasio Kemandirian Daerah
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	TAHUN (RP)					RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011*)	
1	PAD	1.298.365.304.058	1.661.168.634.116	1.687.750.749.401	2.321.748.521.954	2.895.569.551.292	
2	Dana Perimbangan	607.804.085.030	686.851.065.325	744.966.513.378	812.654.173.871	849.490.704.021	
3	Sisa Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
4	Rasio Kemandirian Daerah (RKD)	68,11%	70,75%	69,38%	74,07%	77,32%	71,93%

Sumber : Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010

**) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2011, un-audited*

Memperhatikan rasio kemandirian daerah tahun 2007-2011 yang cenderung terus meningkat dengan rata-rata rasio kemandirian daerah sebesar 71,93% menunjukkan bahwa kemandirian Provinsi Banten semakin baik.

3.1.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017

Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi rata-rata Pendapatan Daerah dalam kurun 5 tahun, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2017 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian regulasi di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 8) Meningkatkan penyertaan modal disetor.

Sedangkan asumsi target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6-7%;
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2011) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun;
- c. Pajak Cukai Rokok akan menjadi komponen pajak daerah mulai Tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar Rp 200 Milyar per Tahun;

- d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 4,7%;
- e. Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembaga-lembaga keuangan bank dan PT. Banten Global Development;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang akan berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru terutama bagi masyarakat menengah kebawah;
- g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2013, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 6-7% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;
- b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dijelaskan sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	3.902.075	4,416,108	4,865,860	5,487,742	6,116,841	6,752,923
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.981.553	3,379,795	3,854,000	4,386,000	4,917,000	5,446,000
1.1.1	Pajak Daerah	2.841.335	3,262,546	3,728,262	4,251,171	4,772,425	5,290,972
1.1.2	Retribusi Daerah	5.818	6,109	6,414	6,735	7,072	7,425
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.800	37,460	42,038	46,987	52,345	58,152
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	73.600	73,680	77,286	81,107	85,158	89,451
1.2	Dana Perimbangan	916.372	1,032,777	1,008,127	1,097,799	1,195,676	1,302,524
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	355.852	448,861	365,819	391,261	418,484	447,612
1.2.2	Dana Alokasi Umum	530.833	583,916	642,308	706,539	777,193	854,912
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.687	-	-	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399
1.3.1	Hibah	4.150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399

Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2012

3.2 BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin yang kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), perluasan lapangan kerja (*pro-job*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environment*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan

kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2012-2017 diarahkan untuk mendukung *pencapaian* sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Banten yang terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik.
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten.
- 4) Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.
- 5) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kawasan dan wilayah yang memadai.
- 6) Penurunan prosentase jumlah pengangguran melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan, peningkatan investasi program multi sektor untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- 7) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk mendukung pengembangan aktivitas ekonomi.

- 8) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Banten, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
- 9) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), dan komitmen pembangunan infrastruktur dengan penganggaran tahun jamak (*multi years*).
- 10) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah kerawanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- e. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang digunakan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus diarahkan dalam rangka mendukung pemerataan/kesenjangan fiskal dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kerawanan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta pengeluaran untuk keperluan belanja yang bersifat mendesak.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2012 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2007		2008		2009		2010		2011		2012
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI
2	BELANJA DAERAH	1,927,221.00	2,029,838.82	2,154,355.04	2,400,889.28	2,366,615.46	2,525,067.96	2,511,267.12	2,981,773.54	3,485,295.19	4,047,764.85	4,134,075.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,047,409.54	1,043,980.18	1,062,050.47	1,218,972.18	1,135,895.70	1,235,697.51	1,146,903.73	1,361,145.38	1,764,096.86	2,133,437.63	2,039,583.00
2.1.1	Belanja Pegawai	198,483.98	216,025.41	225,115.38	254,996.13	304,762.72	324,521.80	353,760.01	322,569.48	345,901.05	326,938.95	367,476.00
2.1.2	Belanja Hibah	0.00	16,000.00	48,078.00	87,948.32	61,591.00	70,691.48	69,705.00	99,155.00	340,463.00	360,163.00	289,420.00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	38,039.77	52,590.54	57,000.00	37,103.72	39,356.25	48,262.50	32,029.94	51,529.94	51,000.00	78,500.00	28,750.00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	540,620.25	550,167.75	576,607.09	620,724.00	575,185.73	589,988.12	601,607.98	742,655.90	730,617.00	1,036,294.86	983,951.00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	260,150.00	201,650.00	147,250.00	211,184.48	150,000.00	197,233.60	79,800.81	140,115.06	291,115.81	316,890.81	364,986.00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9,065.67	6,496.60	8,000.00	7,015.52	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,120.00	5,000.00	14,650.00	5,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Pilkada	1,049.88	1,049.88									
2.2	Belanja Langsung	879,811.46	985,858.64	1,092,304.57	1,181,917.10	1,230,719.77	1,289,370.45	1,364,363.39	1,620,628.17	1,721,198.33	1,914,327.21	2,094,492.00
2.2.1	Belanja Pegawai	158,570.08	160,359.07	149,744.87	151,595.84	108,070.78	111,621.60	108,064.26	114,844.38	130,439.19	136,702.25	142,946.25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	321,603.56	362,576.23	375,876.19	400,786.85	462,842.15	484,630.47	540,140.07	633,755.81	937,361.15	1,029,973.59	916,577.30
2.2.3	Belanja Modal	399,637.83	462,923.33	566,683.51	629,534.41	659,806.84	693,118.39	716,159.05	872,027.97	653,397.99	747,651.37	1,034,968.45

Sumber: Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten TA. 2007 s/d 2012

Gambaran proporsi realisasi jenis belanja terhadap anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten selama 3 tahun terakhir (2009-2011) sebagaimana tertera Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (%)

NO	URAIAN	2009	2010	2011	RATA-RATA
A	Belanja Tidak Langsung	48,49	46,03	53,36	49,29
1	Belanja Pegawai	12,16	9,89	8,22	10,09
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	2,38	3,26	8,97	4,87
5	Belanja Bantuan Sosial	1,99	1,81	2,01	1,94
6	Belanja Bagi Hasil	24,02	25,99	26,04	25,35
7	Belanja Bantuan Keuangan	7,85	4,92	8,12	6,97
8	Belanja Tidak Terduga	0,08	0,15	0,00	0,08
B	Belanja Langsung	51,51	53,97	46,64	50,71
1	Belanja Pegawai	4,41	3,83	3,32	3,85
2	Belanja Barang dan Jasa	18,91	20,99	24,93	21,61
3	Belanja Modal	28,20	29,16	18,39	25,25

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir (tahun 2009 - 2011) proporsi rata-rata penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung terhadap jumlah Anggaran Belanja sebagian besar digunakan untuk belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota dengan proporsi rata-rata 25,35%, sedangkan proporsi rata-rata Belanja Langsung terbesar digunakan untuk Belanja Modal sebesar 25,25% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 21,61%.

Gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Banten selama 3 tahun terakhir (2009-2011) sebagaimana Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	2009	2010	2011
A	Belanja Tidak Langsung	294.424	280.475	317.796
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	130.016	143.221	167.977
2	Belanja Tambahan Penghasilan	76.466	84.350	88.843
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	10.752	12.010	13.090
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	77.191	40.894	47.886
B	Belanja Langsung	267.373	371.147	359.399
1	Belanja Honorarium PNS	21.092	29.393	36.804
2	Belanja Uang Lembur	1.974	1.470	1.911
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20	15	2.428
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.775	1.804	2.440
5	Belanja premi asuransi kesehatan	3.064	3.000	2.415
6	Belanja makanan dan minuman pegawai			
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3.202	2.562	2.447
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.296	5.188	2.983
9	Belanja perjalanan dinas	92.842	107.835	135.756
10	Belanja perjalanan pindah tugas			4
11	Belanja Pemulangan Pegawai	278	560	542
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	139.507	219.321	171.138
Total		560.473	651.622	676.665

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir adalah 13,72%. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat digambarkan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp)	PROSENTASE (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2009	560.472.852.985,00	2.438.320.941.173,00	22,99
2	Tahun Anggaran 2010	651.622.319.373,00	2.839.098.528.450,00	22,95
3	Tahun Anggaran 2011	676.664.631.895,00	3.916.618.114.905,00	17,28

Sumber: DPKAD Provinsi Banten Tahun 2012

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Provinsi Banten yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Adapun rata-rata pertumbuhan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2009-2011 sebesar 30,06%. Gambaran Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, tahun 2009-2011 diuraikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	2009	2010	2011	RATA- RATA PERTUM BUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	722.173.134.586,00	892.000.004.469,00	1.197.136.437.956,00	28,86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	130.015.884.881,00	143.221.149.503,00	167.977.378.667,00	13,72
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	10.751.652.000,00	12.009.801.600,00	13.090.122.000,00	10,35
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
4	Belanja bagi hasil	581.405.597.705,00	736.769.053.366,00	1.016.068.937.289,00	32,32
B	Belanja Langsung	19.272.790.940,00	26.787.803.837,00	30.212.705.884,00	25,89
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	0	0	0	0

2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00	120,83
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	15.988.335.540,00	21.756.634.587,00	25.471.282.839,00	26,58
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	3.264.455.400,00	5.016.169.250,00	4.686.423.045,00	23,54
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0	0	0
C	Pembiayaan Pengeluaran	0	0	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
	TOTAL (A+B+C)	741.445.925.526,00	918.787.808.306,00	1.227.349.143.840,00	28,75

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Dengan memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama sebagaimana Tabel 3.9, maka dapat diproyeksikan anggaran belanja selama 5 tahun kedepan (2012-2017) untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Rencana Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN STRUKTUR 2013	RANCANGAN STRUKTUR 2014	RANCANGAN STRUKTUR 2015	RANCANGAN STRUKTUR 2016	RANCANGAN STRUKTUR 2017
1	PENDAPATAN DAERAH	3,902,075,000,000	4,416,108,000,000	4,865,860,000,000	5,487,742,000,000	6,116,841,000,000	6,752,923,000,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,981,553,000,000	3,379,795,000,000	3,854,000,000,000	4,386,000,000,000	4,917,000,000,000	5,446,000,000,000
1.1.1	Pajak Daerah	2,841,335,000,000	3,262,546,000,000	3,728,262,000,000	4,251,171,000,000	4,772,425,000,000	5,290,972,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	5,818,000,000	6,109,000,000	6,414,000,000	6,735,000,000	7,072,000,000	7,425,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60,800,000,000	37,460,000,000	42,038,000,000	46,987,000,000	52,345,000,000	58,152,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,600,000,000	73,680,000,000	77,286,000,000	81,107,000,000	85,158,000,000	89,451,000,000
1.2	Dana Perimbangan	916,372,000,000	1,032,777,000,000	1,008,127,000,000	1,097,800,000,000	1,195,677,000,000	1,302,524,000,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	355,852,000,000	448,861,000,000	365,819,000,000	391,261,000,000	418,484,000,000	447,612,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	530,833,000,000	583,916,000,000	642,308,000,000	706,539,000,000	777,193,000,000	854,912,000,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	29,687,000,000	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4,150,000,000	3,536,000,000	3,733,000,000	3,942,000,000	4,164,000,000	4,399,000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	4,150,000,000	3,536,000,000	3,733,000,000	3,942,000,000	4,164,000,000	4,399,000,000
1.3.2	Dana Penyesuaian (BOS)	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA DAERAH	4,134,075,000,000	4,596,108,000,000	5,030,860,000,000	5,677,742,000,000	6,281,841,000,000	6,892,923,000,000
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,039,583,000,000	2,219,289,000,000	2,398,729,000,000	2,755,222,000,000	2,944,749,000,000	3,188,132,000,000
2.1.1	Belanja Pegawai	367,476,000,000	423,857,000,000	508,628,400,000	620,526,648,000	732,221,444,640	798,121,374,658
2.1.2	Belanja Hibah	289,420,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	28,750,000,000	29,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	983,951,000,000	1,150,012,000,000	1,230,326,460,000	1,402,886,430,000	1,574,900,250,000	1,746,020,760,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	364,986,000,000	381,420,000,000	394,774,140,000	466,808,922,000	372,627,305,360	378,989,865,342
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Operasional Sekolah		-	-	-	-	-

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN STRUKTUR 2013	RANCANGAN STRUKTUR 2014	RANCANGAN STRUKTUR 2015	RANCANGAN STRUKTUR 2016	RANCANGAN STRUKTUR 2017
	(BOS)						
2.2	Belanja Langsung	2,094,492,000,000	2,376,819,000,000	2,632,131,000,000.00	2,992,520,000,000.00	3,337,092,000,000.00	3,704,791,000,000.00
2.2.1	Belanja Pegawai	142,946,249,500	150,000,000,000	160,000,000,000.00	170,000,000,000.00	180,000,000,000.00	190,000,000,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916,577,299,864	950,000,000,000	1,100,000,000,000.00	1,150,000,000,000.00	1,250,000,000,000.00	1,300,000,000,000.00
2.2.3	Belanja Modal	1,034,968,450,636	1,350,641,000,000	1,372,131,000,000.00	1,672,520,000,000.00	1,907,092,000,000.00	2,214,791,000,000.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(232,000,000,000)	(180,000,000,000)	(165,000,000,000.00)	(190,000,000,000.00)	(165,000,000,000.00)	(140,000,000,000.00)
3	PEMBIAYAAN	232,000,000,000	180,000,000,000	165,000,000,000.00	190,000,000,000.00	165,000,000,000.00	140,000,000,000.00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	264,000,000,000	240,000,000,000	225,000,000,000.00	200,000,000,000.00	175,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	264,000,000,000	240,000,000,000	225,000,000,000.00	200,000,000,000.00	175,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	32,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	32,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.1.1	LPK/BPR	10,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
3.2.1.2	PT. BGD	10,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1.3	Bank BJB Syariah	12,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1.4	PT. PPKD	-	26,000,000,000	26,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Penjaminan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.3	Pembiayaan Netto	232,000,000,000	180,000,000,000	165,000,000,000.00	190,000,000,000.00	165,000,000,000.00	140,000,000,000.00

Sumber : Bappeda Provinsi Banten 2012

Gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapatsitas pendanaan pembangunan daerah, tergambar pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	APBD TA. 2012	RANCANGAN TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
2	BELANJA DAERAH	5,180,595	4,596,108	5,030,860	5,677,742	6,281,841	6,892,923
2.1	Belanja Tidak Langsung	3,086,103	2,219,289	2,398,729	2,755,222	2,944,749	3,188,132
2.1.1	Belanja Pegawai	367,476	423,857	508,628,4	620,526,6	732,221,4	798,121,3
2.1.2	Belanja Hibah	289,420	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	28,750	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	983,951	1,150,012	1,230,326,46	1,402,886,4	1,574,900,2	1,746,020,7
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	364,986	381,420	394,774,14	466,808,9	372,627,3	378,989,8
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.1.7	Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1,046,520	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Langsung	2,094,492	2,376,819	2,632,131	2,992,520	3,337,092	3,704,791
2.2.1	Belanja Pegawai	144,083.79	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	919,380.18	950,000	1,100,000	1,150,000	1,250,000	1,300,000
2.2.3	Belanja Modal	1,031,028	1,350,641	1,372,131	1,672,520	1,907,092	2,214,791

Sumber: Bappeda Provinsi Banten 2012

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menunjang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Penyertaan modal diarahkan pada lembaga keuangan bank dan BUMD yang diharapkan ikut menunjang peningkatan aktivitas perekonomian daerah;
3. Penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)

Penutup Defisit Riil Anggaran

Pada tahun 2009 dan 2010 realisasi belanja daerah lebih kecil dari realisasi pendapatan, yang berarti terjadi surplus, namun setelah dikurang pengeluaran pembiayaan, terdapat defisit riil sebesar Rp. 2.224.818.832,00. Demikian pula pada Tahun 2011 realisasi belanja daerah diatas realiasi pendapatan daerah, sehingga harus ditutup oleh realiasasi penerimaan pembiayaan.

3.4 NERACA DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten selama kurun waktu 2007–2011 dijelaskan sebagai berikut:

Selama kurun waktu 2007-2011, rata-rata pertumbuhan jumlah Aset Daerah Pemerintah Provinsi Banten mencapai 31,86% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Rata-rata pertumbuhan aset lancar mencapai 42,31% meskipun piutang menurun sebesar 14,94%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 38,85% dan 126,68%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Provinsi Banten berada pada kondisi sehat.

Tabel 3.12
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	42,31
1.1.1	Kas	38,85
1.1.2	Piutang	-14,94
1.1.3	Persediaan	126,68
1.2	INVESTASI	6,28
1.3	ASET TETAP	34,48
1.3.1	Tanah	54,73
1.3.2	Peralatan dan mesin	12,80
1.3.3	Gedung dan bangunan	38,67
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	24,75
1.3.5	Aset tetap lainnya	10,72
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	97,79
1.4	ASET LAINNYA	782,67
1.4.1	Tagihan penjualan angsuran	-
1.4.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	44,31
1.4.3	Kemitraan dengan pihak kedua	
1.4.4	Aset tak berwujud	
1.4.5	Aset Lain-Lain	421,10
	JUMLAH ASET DAERAH	31,86
2	KEWAJIBAN	112,34
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	112,34
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	-2,26
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Pokok Pinjaman	-
2.1.5	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman	-
2.1.6	Utang Bagi Hasil Pajak kepada PEMKAB/PEMKOT	115,27
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	39,57
3.1.1	SILPA	38,86
3.1.2	Cadangan piutang	-15,24
3.1.3	Cadangan persediaan	126,68
3.1.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-29,61
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	32,47
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	34,48
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	403,62

NO	URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
3.2.3	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	32,67

Sumber : Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2007-2010 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA 2011, un-audited

Ekuitas Dana yang meliputi dana lancar, dana investasi, dan dana cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana Pemerintah Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 32,67% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Rasio lancar Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 termasuk kategori lancar dikarenakan rasio lancar menunjukkan angka lebih besar dari satu (100%) yaitu masing-masing sebesar 405,50%, 425,18% dan 449,78%. Artinya bahwa kewajiban yang segera harus dibayar (tidak lebih dari satu tahun) dapat terbayarkan segera dengan mengandalkan aset lancar yang terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Tabel 3.13
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	2009	2010	2011
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>) (%)	405,50	423,18	449,78
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%)	390,48	400,57	343,15
3	Rasio total hutang terhadap total asset (%)	1,45	1,87	1,38
4	Rasio hutang terhadap modal (%)	1,45	1,91	1,40
5	Rata-rata umur piutang (hari)	0,38	0,30	0,23
6	Rata-rata umur persediaan (hari)	55,39	103,50	95,12

Sumber : DPKAD Provinsi Banten 2011

Rasio cepat (*quick ratio*) Pemerintah Provinsi Banten juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 390,48% pada tahun 2009. Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio total hutang terhadap total asset Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu masing-masing 1,45%, 18,87% dan 1,38%. Dengan demikian hanya sebagian kecil saja aset yang dimiliki yang tidak signifikan terbebani utang jangka pendek.

Rasio utang terhadap modal Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang sangat rendah dan tidak signifikan yaitu masing-masing sebesar 1,45%, 1,91% dan 1,40%. Dengan demikian hanya sebagian kecil modal yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten yang terbebani kewajiban jangka pendek.

Rata-rata umur piutang Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang rendah (tidak lama) yaitu masing-masing sebesar 0,38 hari, 0,30 hari dan 0,23 hari. Dengan demikian piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten sangat segera berubah bentuk menjadi kas.

Rata-rata umur persediaan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009-2011 menunjukkan tingkat yang rendah (tidak lama) yaitu masing-masing sebesar 55,39 hari, 103,5 hari dan 95,12 hari. Dengan demikian bentuk aset lain-lain yang mengendap berupa persediaan relatif lama namun kurang dari satu tahun.

3.5 RENCANA KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan

untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2012-2017) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagaimana Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi Banten Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2012-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	3,902,075	4,416,108	5,610,535	5,281,287	5,798,515	6,351,292
	Pendapatan Asli Daerah	2,981,553	3,379,795	4,598,675	4,179,546	4,598,675	5,044,369
	Dana Perimbangan	916,372	1,032,777	1,008,127	1,097,799	1,195,676	1,302,524
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,150	3,536	3,733	3,942	4,164	4,399
2	Penerimaan Pembiayaan	264,000	240,000	225,000	200,000	175,000	150,000
	Total penerimaan (1+2)	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
3	Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
	Total Pengeluaran (3)	4,166,075	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
4	Surplus/Defisit Riil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2012 -2017 sebagaimana Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2013-2017 (Rp. Juta)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan	4,416,108	5,610,535	5,281,287	5,798,515	6,351,292
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	240,000	225,000	200,000	175,000	150,000
	Total penerimaan	4,656,108	5,835,535	5,481,287	5,973,515	6,501,292
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,368,728	1,465,120	1,672,208	1,813,460	1,967,487
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3,287,380	4,370,415	3,809,079	4,160,055	4,533,805

Sumber: DPKAD Provinsi Banten 2012